

Authors

¹Halasson Fransisco Sinuarit

²Muchlis Hamdi

³Wirman Syafri

⁴Mansyur Achmad

Affiliation

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

Email

franssinurat2012@gmail.com

Date Submission

13 Januari 2023

Date Accepted

16 Januari 2023

Date Published

31 January 2023

DOI

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANGGA PAPUA (BANGUN GENERASI DAN KELUARGA PAPUA SEJAHTERA) DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the BANGGA Papua policy in the Asmat district, Papua Province. The research method used is a descriptive qualitative approach, with the aim of presenting a complete picture of the problem under study. Data collection by interviews, observation, documentation studies and data analysis techniques through data reduction and drawing conclusions with a total of 42 informants. The results and discussion of the implementation of the BANGGA Papua policy (Building a Prosperous Papuan Generation and Family) in Asmat District, Papua Province, explain that the productivity of the BANGGA Papua policy, as seen from the number of achievements of the target group of beneficiary communities, has not been productive because the target beneficiaries have not been achieved due to the cessation of the BANGGA Papua program which has not been running for five years. Then from the linearity dimension seen from the procedure, time, cost, place and implementation it can be said that the implementation has been linear or in accordance with the procedure, cost, place and implementer, although in terms of the time aspect the implementation of the BANGGA Papua program has not been appropriate. The existence of delays and delays in several stages of the BANGGA Papua program implementation resulted in the achievement of program targets not being achieved. While the efficiency of the implementation of the BANGGA Papua policy, seen from assets, funds and technology, is in accordance with the design of the Governor of Papua Regulation Number 23 of 2018 concerning the Program to Build a Prosperous Papuan Generation and Family

Keywords: BANGGA Papua, Papua Golden Generation, Policy Implementation

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui

implementasi kebijakan BANGGA Papua di kabupaten Asmat Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deksriptif, dengan tujuan menyajikan gambaran lengkap terkait masalah yang di teliti. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi serta teknis analisis data melalui reduksi data dan penarikan kesimpulan dengan jumlah informan 42. Hasil dan pembahasan implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, menjelaskan bahwa produktivitas kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari jumlah pencapaian kelompok sasaran masyarakat penerima manfaat belum produktif karena tidak tercapainya target penerima manfaat akibat terhentinya program BANGGA Papua yang belum berjalan lima tahun. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana dapat dikatakan bahwa implementasi telah linear atau sesuai dengan prosedur, biaya, tempat dan pelaksana, meskipun dalam aspek waktu pelaksanaan program BANGGA Papua belum sesuai. Adanya keterlambatan dan penundaan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program BANGGA Papua menyebabkan capaian target program tidak tercapai. Sedangkan efisiensi Implementasi kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari asset, dana dan teknologi sudah sesuai dengan desain Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.

Kata Kunci : BANGGA Papua, Generasi Emas Papua, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan, Kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya segelintir orang saja (Linjtewas et al., 2016). Dilihat dari sisi poverty profile atau bentuk-bentuk persoalan kemiskinan masyarakat, menurut gani & Simanjuntak (2019) kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (welfare) semata; tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan

terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Astuti, 2014).

Persoalan kesejahteraan di wilayah-wilayah Indonesia, permasalahan kesejahteraan di wilayah Papua masih menyedot perhatian, bahkan sejak era awal-awal kemerdekaan RI. Presiden pertama RI Ir. Soekarno menaruh perhatian besar terhadap Papua. Perhatian terhadap Papua tidaklah tanpa alasan, karena Tanah Papua memiliki tutupan hutan terbesar masing-masing 8,7 juta hektar di provinsi Papua Barat dan 33,7 juta hektar di provinsi Papua. Dari kekayaan alam tersebut, selama ini beberapa wilayah telah memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Tanah Papua juga memiliki komoditas tanaman unggulan seperti kopi, kakao, rumput laut, pala, sagu dan masih banyak lagi yang memiliki nilai ekspor tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor non-migas dari bumi Cendrawasih tercatat mencapai USD 407 juta. Tak hanya itu, hutan juga memiliki potensi lain seperti keanekaragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Di Tanah Papua terdapat lebih dari 25 hingga 30 ribu jenis tanaman obat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan farmasi (Ismail, 2015). Namun demikian, besarnya kekayaan alam di Papua tidak berbanding dengan kesejahteraan masyarakatnya. Di antara potensi kekayaan alam yang terkandung di bumi Papua, tidak pula berbanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan menjadi ironis di antara besarnya kekayaan alam hingga kini penduduknya masih amat banyak yang tidak sejahtera.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Papua 2017-2021

Tahun Year	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People		
	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
(1)	(8)	(9)	(10)
2017			
Maret/ March	4,46	36,20	27,62
September/ September	4,55	36,56	27,76
2018			
Maret/ March	4,51	36,63	27,74
September/ September	4,01	36,65	27,43
2019			
Maret/ March	4,26	36,84	27,53
September/ September	4,53	35,36	26,55
2020			
Maret/ March	4,47	35,50	26,64
September/ September	4,59	35,69	26,80

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Papua tahun 2017-2021 rata-rata 27% dari total penduduk Provinsi Papua. Dibandingkan di perkotaan, sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di pedesaan. Hal tersebut menjadi gambaran adanya *gap* antara kekayaan alam yang dimiliki sementara jumlah penduduk miskinnya masih banyak (Hubeis, 2019).

Kabupaten Asmat, yang merupakan daerah pemekaran baru. Sebelumnya Kabupaten Asmat merupakan bagian dari Kabupaten Merauke. Namun, sejak 2002

Kabupaten Asmat berdiri sebagai wilayah administrasi yang terpisah dari Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Saat ini, Kabupaten Asmat memiliki 23 distrik dengan luasan wilayah 31.983,69 kilometer persegi. Populasi penduduknya yang didominasi suku Asmat mencapai 97.490 jiwa pada 2019. Asmat, dikenal sebagai salah satu suku asli dan terbesar di Tanah Papua bagian Selatan. Pembangunan manusia di Provinsi Papua pada tahun 2019 termasuk ke dalam kategori sedang (*medium human development*) dengan nilai mencapai 64,70 yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Asmat masih sebesar 50,37, bahkan di bawah rata-rata Papua sebesar 60,4. Begitu pula dengan angka harapan hidup Kabupaten Asmat yang juga masih rendah, yakni 57,53 tahun. Merujuk Statistik Daerah Kabupaten Asmat, rata-rata pengeluaran riil masyarakat Asmat sebesar Rp 6,06 juta per tahun.

Di saat yang sama pengeluaran penduduk di wilayah lainnya mampu mencapai Rp 8-10 juta per tahun. Angka-angka statistik ini juga relevan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana data mengungkapkan adanya permasalahan dalam kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, termasuk di dalamnya di Kabupaten Asmat, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya guna mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan (Korain et al., 2020).

Salah satunya dengan program kebijakan BANGGA Papua sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan program perlindungan sosial atau disebut Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera atau disebut Program BANGGA Papua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk menghasilkan Generasi Emas Papua, yang diformulasikan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA) Papua.

Kabupaten Asmat memperoleh Program BANGGA Papua “Bangun Generasi Dan Keluarga Papua Sejahtera” dikarenakan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Asmat terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di Papua. Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah Provinsi Papua membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan secara rinci tujuan dibuatnya Program BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) yaitu: 1) Meningkatkan gizi

dan kesehatan anak berusia 4 tahun ke bawah; 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan; 3) Mengurangi tingkat kemiskinan (Larasati et al., 2019).

Namun demikian, pada pelaksanaannya, program BANGGA Papua mengalami sejumlah kendala dan persoalan yang di hadapi. Salah satu kendala dan persoalan yang dihadapi yaitu terkait kondisi geografis Kabupaten Asmat yang memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari pedesaan-pedesaan di pelosok yang sulit diakses dan terisolir, sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kesulitan akses tersebut menuntut penyaluran program BANGGA Papua menggunakan jalur dan transportasi khusus, yaitu akses laut dan sungai dengan menggunakan perahu atau *speed boat*. 224 Kampung tersebar di pelosok Kabupaten Asmat menimbulkan biaya transportasi tinggi yang sangat mahal.

Kendala selanjutnya adalah pada penyaluran BANGGA Papua, dimana hal ini adalah karena tidak semua desa atau distrik di wilayah di Kabupaten Asmat memiliki Kantor Cabang Bank Papua sebagai sarana penyaluran BANGGA Papua. Selain melalui Cabang Bank Papua, penyaluran juga melalui *payment poin*, dimana hal tersebut juga masih terbatas. Akibatnya, penerima manfaat harus mengambarnya ke bank terdekat di ibukota distrik yang jaraknya juga jauh, harus mengantre yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Meskipun penyalurannya dibantu oleh tim pendamping dan penyalur, namun tidak semua wilayah dapat terjangkau tim. Begitu pula dengan pola hidup nomaden masyarakat Kabupaten Asmat, hal tersebut juga menjadi kendala di saat tim penyalur mendatangi untuk menyalurkan BANGGA Papua, namun warga tidak di tempat (Mustafa et al., 2016). Permasalahan selanjutnya adalah pemanfaatan Program BANGGA Papua yang kurang tepat sasaran, dimana berdasarkan pengamatan peneliti pada pra penelitian, ditemukan adanya persoalan konsumtif penerima manfaat BANGGA Papua. Hal tersebut ditemukan bahwa adanya orang tua penerima manfaat yang tidak memprioritaskan kebutuhan anak, termasuk Bapak tidak memprioritaskan kebutuhan Ibu dikarenakan kesulitan ekonomi dan ketidak-berdayaan dalam keuangan akibat tidak adanya penghasilan yang tetap karena tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap.

Adanya persoalan dan kendala yang dihadapi dapat mengindikasikan bahwa program BANGGA Papua belum optimal terimplementasikan. Pentingnya pelaksanaan suatu kebijakan atau program, karena implementasi merupakan sebagai bagian dari proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi maka kebijakan publik yang telah disusun tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuannya artinya rancangan atau susunan kebijakan tidak berarti apa-apa. Demikian pula dikatakan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan dari pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan model implementasi kebijakan diatas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Hamdi Muchlis karena variabel-variabel yang ditawarkan oleh ahli tersebut dianggap tepat

untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang Implementasi Kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Beberapa determinan dan dimensi yang dikemukakannya dapat membantu peneliti dalam menilai sejauhmana dan bagaimana Implementasi Kebijakan BANGGA Papua ini efektif sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Kabupaten Asmat. Untuk itu, *quesi* yang menarik untuk dijawab secara faktual yang dituangkan dalam penelitian "Implementasi Kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-Deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan terkait dengan Implementasi Kebijakan BANGGA Papua (bangun generasi dan keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dan apa saja faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya. Grand theory yang digunakan yaitu adalah konsep Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Hamdi, terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun faktor tersebut yakni sumberdaya, partisipasi kelompok sasaran, substansi kebijakan, perilaku pelaksana dan interaksi jejaring kinerja.

Dalam penelitian ini, grand theory yang digunakan yaitu adalah konsep Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Hamdi, terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun faktor tersebut yakni sumberdaya, partisipasi kelompok sasaran, substansi kebijakan, perilaku pelaksana dan interaksi jejaring kinerja. Kemudian dalam menilai keberhasilan implementasi terdapat tiga dimensi penting, yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif untuk mengetahui implementasi kebijakan Program BANGGA Papua. Terkait dengan penjelasan teknik pengumpulan data, dikaitkan bahwa sebagai seorang peneliti kualitatif perlu dimilikinya pemahaman tentang akal sehat (*commonsense* understanding) yang mana peneliti harus bisa melihat dan membedakan mana yang benar dan nyata dengan mana yang keliru atau inkonheren berdasarkan perspektif dan logika peneliti, mungkin menurut subyek terhadap dunia ini, anda harus dapat mengetahui, menerima dan menyajikan pandangan mereka itu sebagaimana mestinya. Pada penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yang mana teknik ini melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil temuan analisis di bawah ini, dapat diuraikan beberapa faktor-faktor yang menurut peneliti merupakan faktor krusial

yang cukup dominan dibanding faktor lainnya yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan program BANGGA Papua, yaitu :

Tabel 2. Rekap Hasil Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BANGGA Papua

No.	Dimensi / Sub Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1. Substansi Kebijakan			
	Spesifikasi kebijakan	1) Adanya petunjuk teknis operasional sebagai landasan teknis pelaksanaan program BANGGA Papua.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada jaminan keberlangsungan program - Tidak ada aturan atau ketentuan sanksi bagi penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan. - Kultur dan paradigma masyarakat banyak anak banyak kesempatan mendapat bantuan. Pemahaman masyarakat seperti ini kontra dengan kebijakan Keluarga Berencana.
	Keselarasan isi kebijakan dengan kebijakan lain	2) Adanya perencanaan, RPJMD dan regulasi yang selaras dengan kebijakan BANGGA Papua.	3) Kondisi darurat yang menyebabkan munculnya kebijakan baru yang dapat menghentikan pelaksanaan kebijakan BANGGA Papua. Seperti <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
2. Perilaku tugas pelaksana			
	Motivasi kerja	4) Adanya fasilitas, peralatan dan anggaran kegiatan bagi untuk mendukung kinerja pelaksana kebijakan. 5) Adanya struktur organisasi kerja atau tim yang solid. 6) Adanya kolaborasi dan	7) Kondisi geografis, jarak yang berjauhan, kesulitan aksesibilitas dan sarana transportasi, sehingga biaya operasional (transportasi) sangat mahal. 8) Sarana prasarana belum representatif, sekretariat Sekber BANGGA Papua sering tidak menetap. 9) Anggota Sekber BANGGA Papua berasal dari PNS sehingga kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan utama dan tugas di sekber.

No.	Dimensi / Sub Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		kerja sama OPD, Gereja dan tokoh- tokoh masyarakat.	
	Kemampuan pembelajaran	10) Adanya kegiatan pelatihan dan sosialisasi program 11) Adnya fasilitator mitra di luar pemerintahan (Kompak dan Mahkota)	12) Kekurangan SDM pelaksana 13) Budaya masyarakat 14) Rendahnya pendidikan masyarakat sehingga membuat rendahnya pemahaman masyarakat
	Penyalahgunaan wewenang	15) Dukungan teknologi informatika meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 16) Adanya pengawasan berjenjang	17) Rendahnya kesadaran dan komitmen pelaksana
3. Interaksi jejaring kerja			
	Kerjasama Antar Pelaksana	18) Adanya legitimasi pembentukan Sekretariat Bersama BANGGA Papua (Pergub Papua No.23 tahun 2018) 19) Adanya kesamaan pemahaman, tanggung jawab, target, dan tuntutan kerja 20) Komitmen pimpinan	22) Adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program BANGGA Papua 23) Keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur komunikasi 24) Rendahnya kesadaran dan komitmen pelaksana 25) Kondisi geografis, jangkauan jarak dan kesulitan aksesibilitas

No.	Dimensi / Sub Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		daerah dan OPD 21) Adanya kerja sama melalui sekretariat Bersama BANGGA Papua	
	Hubungan kewenangan provinsi dan kabupaten	26) Adanya regulasi mengaur kewenangan provinsi dan kabupaten 27) Komitmen pimpinan daerah Provinsi dan kabupaten	28) Koordinasi yang kurang optimal
4. Partisipasi kelompok sasaran			
	Tingkat penerimaan masyarakat terhadap manfaat kegiatan	29) Dukungan SDM pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) 30) Dukungan dari pihak di luar pemerintah 31) Animo masyarakat cukup tinggi 32) Adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 33) Masyarakat difasilitasi dan dimudahkan dalam pengurusan	34) Perubahan komitmen anggaran (<i>refocusing</i> anggaran) 35) Tidak ada jaminan keberlangsungan program, sehingga program terhenti 36) Kultur masyarakat, seperti pemberian anak yang menyebabkan data ganda pada penerima manfaat 37) Kondisi geografis sehingga kesulitan aksesibilitas dan jangkauan 38) Penyalahgunaan bantuan 39) Kultur masyarakat nomaden 40) Keterbatasan Infrastruktur komunikasi

No.	Dimensi / Sub Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		dokumen kependudukan	
	Kemampuan berkontribusi kelompok sasaran	41) Antusias masyarakat penerima bantuan 42) Animo masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan 43) Keterlibatan tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, dan tetua kampung) 44) Adanya media sosialisasi dan edukasi	45) Upaya manipulasi data penerima manfaat 46) Poligami pada kultur masyarakat 47) Pembengkakan biaya operasional karena penerima bantuan membawa bayi sehingga pelaksana menyediakan fasilitas tambahan (makanan bagi bayi) 48) Kondisi geografis, kesulitan jangkauan dan aksesibilitas 49) Rendahnya tingkat Pendidikan sehingga tingkat pemahaman terhadap tujuan dan tahapan-tahapan pelaksanaan program rendah
5. Sumber daya			
1	Sumber daya Dana	50) Komitmen pimpinan daerah untuk menyediakan anggaran 51) Regulasi dan mekanisme penganggaran	52) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah 53) Rendahnya komitmen terhadap pendayagunaan dana Otsus Papua 54) Kondisi geografis, sulitnya aksesibilitas dan jangkauan 55) Rawan gangguan keamanan dan bencana alam
2	Sumber daya manusia	56) Adanya kebijakan PNS sebagai pelaksana program dalam sekretariat Bersama. 57) Adanya kegiatan pelatihan-	58) Ketersediaan SDM terbatas 59) Minimnya anggaran untuk menambah ketersediaan SDM

No.	Dimensi / Sub Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		pelatihan untuk SDM pelaksana	
3	Peralatan	60) Adanya bantuan peralatan dari provinsi dan pihak di luar pemerintah (LSM/NGO) 61) Adanya anggaran untuk peralatan	62) Kesulitan ketersediaan bahan bakar 63) Kondisi geografis, sulitnya jangkauan dan aksesibilitas 64) Kondisi rawan keamanan dan bencana 65) Keterbatasan anggaran untuk mencukupi kebutuhan peralatan
4	Informasi	66) Adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi 67) Adanya saluran informasi melalui jalur <i>hotline</i> 68) Adanya media informasi, sosialisasi dan edukasi melalui pamflet, spanduk, brosur, dll	69) Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi 70) Jaringan komunikasi (telepon dan internet) belum seluruhnya dapat mencapai semua distrik dan kampung
5	Teknologi	71) Adanya aplikasi untuk penginputan 72) Adanya SDM operator 73) Adanya pelatihan untuk operator	74) Aplikasi tidak bisa <i>offline</i> , sehingga ketika internet kegiatan terhenti 75) Aplikasi belum terintegrasi ke data SIAK 76) Infrastruktur jaringan komunikasi (telepon dan internet) belum merata di seluruh distrik dan kampung

Sumber : hasil temuan peneliti, 2022

Substansi Kebijakan

Berdasarkan perspektif dimensi substansi kebijakan, digambarkan bahwa isi kebijakan dipandang cukup jelas, spesifik dan selaras dengan kebijakan atau regulasi lainnya. Adanya regulasi-regulasi yang sejalan dengan kebijakan program BANGGA Papua dan adanya petunjuk teknis operasional merupakan faktor

pendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, tidak adanya jaminan keberlangsungan program, tidak ada aturan sanksi bagi penyalahgunaan bantuan BANGGA Papua, serta kultur masyarakat dapat menghambat implementasi BANGGA Papua

Perilaku Tugas Pelaksana

Berdasarkan perspektif perilaku tugas pelaksana, dapat dikatakan bahwa perilaku tugas pelaksana sudah cukup baik dalam melaksanakan program BANGGA Papua. Keterlibatan fasilitator di luar pemerintahan, adanya pengawasan berjenjang dan adanya teknologi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dapat mendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, rendahnya kesadaran dan komitmen para pelaksana, ketersediaan SDM pelaksana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang menyulitkan aksesibilitas dan jangkauan merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi BANGGA Papua.

Interaksi Jejaring Kerja

Berdasarkan perspektif interaksi jejaring kerja, dapat dikatakan bahwa jejaring kerja cukup berinteraksi dengan baik. Adanya kelembagaan melalui sekretariat Bersama BANGGA Papua yang terlegitimasi oleh regulasi, komitmen pimpinan daerah dan kesamaan pemahaman terhadap tanggungjawab dan tuntutan target kerja merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan. Namun demikian, adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program, keterbatasan sarana prasarana komunikasi, serta koordinasi yang belum intensif merupakan faktor penghambat implementasi program BANGGA Papua.

Partisipasi Kelompok Sasaran

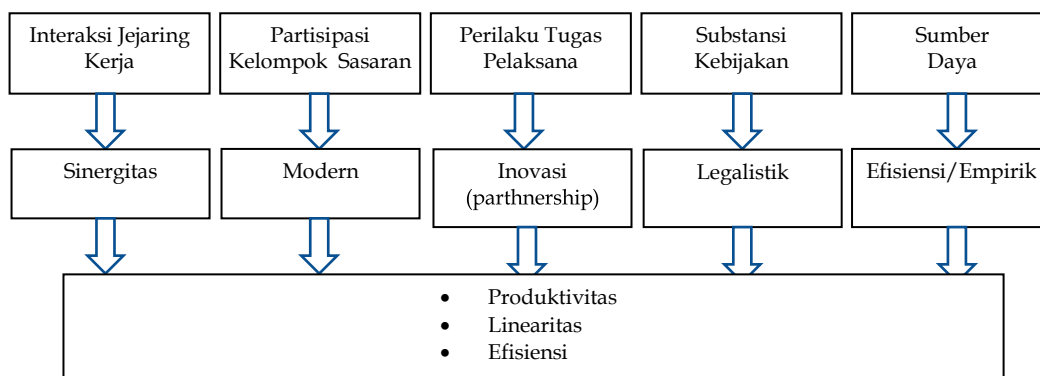
Berdasarkan perspektif partisipasi kelompok sasaran, dapat dikatakan bahwa kelompok sasaran cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan program BANGGA Papua. Dukungan fasilitator di luar pemerintah, animo masyarakat, dukungan dan keterlibatan tokoh masyarakat merupakan faktor pendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur komunikasi, kultur masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta kondisi geografis yang menyulitkan jangkauan dan aksesibilitas merupakan faktor penghambat implementasi BANGGA Papua.

Sumber Daya

Berdasarkan perspektif sumber daya, dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan program BANGGA Papua masih kurang optimal. Adanya media dan kegiatan sosialisasi dan edukasi, bantuan peralatan dari fasilitator dan pihak di luar pemerintahan, serta aplikasi merupakan faktor pendukung. Namun demikian, hambatan dari dimensi sumber daya cukup besar. Anggaran, SDM, teknologi, infrastruktur komunikasi dan peralatan yang ada masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan ideal.

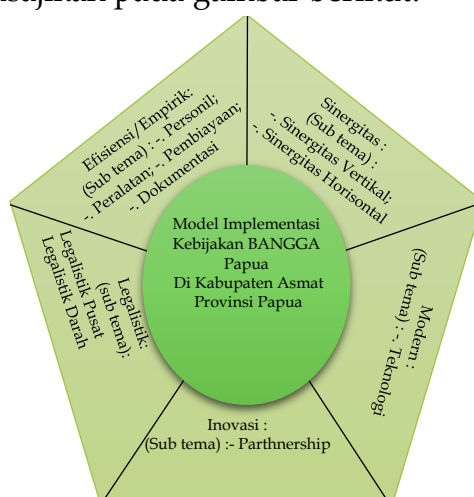
Sehingga sejak awal sudah dapat diambil keputusan, apa yang harus dilaksanakan guna implementasi kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua ini agar berjaya dengan sukses tanpa hambatan dan kendala yang besar. Untuk itu, suatu model implementasi program terkait pemberian bantuan sosial perlu untuk memberikan parameter maupun acuan konseptual maupun procedural dalam rangka pencapaian tujuan suatu kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Model disusun atas kerangka teori yang telah ada dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan Fatmawati (2021), yang dipadukan dengan hasil temuan untuk memperoleh konstruksi dimensi apa saja yang sesuai untuk diterapkan, atau mejadi koseptual dalam rangka menidealkan dan menjadikan implemenasi kebijakan berhasil guna secara maskimal.

Berikut hasil elaborasi maupun rekonstruksi model ke dalam konsep-konsep dimensi yang dirancanag peneltil, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Rancangan Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengusulkan model untuk implementasi kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat ini, dengan nama "LISME", sebagaimana dsajikan pada gambar berikut:



Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, (Kebijakan SMILE)

Adapun penjelasan dan uraian mengenai dimensi-dimensi model sebagai berikut:

1. Sinergitas,

Sinergitas dimaknai secara sederhana sebagai keterpaduan. Oleh karena itu, suatu implementasi kebijakan idealnya tidak mampu dilaksanakan hanya mengandalkan satu organisasi atau satu pihak semata, ia akan lebih mencapai efektivitasnya jika dilakukan secara Bersama-sama. Sinergitas dalam konsep ini dapat mengarah pada kontekstual kolaborasi. Artinya segenap elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah maupun *civil society* secara Bersama-sama bekerja mewujudkan capaian tujuan kebijakan publik. Dimensi ini dielaborasi dari temuan analisis bahwa program BANGGA Papua pada dasarnya telah diimplementasikan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Asmat, akan tetapi capaian produktivitasnya rendah. Adanya kelembagaan melalui sekretariat Bersama BANGGA Papua yang terlegitimasi oleh regulasi, komitmen pimpinan daerah dan kesamaan pemahaman terhadap tanggung jawab dan tuntutan target kerja merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan. Namun demikian, adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program, keterbatasan sarana prasarana komunikasi, serta koordinasi yang belum intensif merupakan faktor penghambat implementasi program BANGGA Papua.

Untuk itu, dimensi sinergitas pada dasarnya menawarkan pemahaman bahwa, agar implementasi berhasil guna, dibutuhkan sinergi dalam konteks kolaborasi idealnya mampu mendayagunakan kelembagaan Bersama sebagaimana pada sekber BANGGA Papua, yang terlegitimasi oleh regulasi, didukung oleh *leadership* pimpinan daerah sebagai katalisator sehingga dapat membangun koordinasi yang baik. Dampak dari hal tersebut yaitu persoalan keterbatasan sarana prasarana dan adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program akan lebih ringan diatasi secara sinergis, bersama-sama, atau dalam konteks kolaborasi, secara kolaboratif (Roebyanto & Unayah, 2014). Dimensi sinergitas ini meliputi kolaborasi lintas sektoral baik vertikal antara provinsi dengan kabupaten, maupun secara horizontal baik antara organ pemerintah daerah, misalnya antar sekber kabupaten/kota, maupun antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat lainnya yaitu swasta, LSM dan *civil society* (Roziqi & Rosyidin, 2020).

2. Modern

Modern dimaknai peneliti sebagai sikap dan cara berpikir yang baru, yang disesuaikan dengan dimensi waktu, yaitu sesuai zamannya. Maka cara-cara tradisional dalam pelaksanaan program yang terlalu birokratis, lambat dan berpotensi adanya penyelewengan, harus diperbaharui dengan produk-produk atau sistem yang dihasilkan dari paradigma sikap dan perilaku yang modern (Sirajuddin, 2016). Karena pada zaman kini merupakan era globalisasi dan era teknologi, maka mau tidak mau segala aspek kehidupan, termasuk tata Kelola pemerintahan dalam pelaksanaan suatu program kebijakan, sedapat mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi. Maka dengan hadirnya SIM BANGGA Papua secara *online*, sudah merupakan manifestasi dari konsep modern dalam pengelolaan pemerintahan.

Dimensi ini dielaborasi dari temuan penelitian yaitu program BANGGA yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Asmat pada dasarnya cukup baik, namun produktivitasnya masih rendah. Dukungan fasilitator di luar pemerintah, animo masyarakat, dukungan dan keterlibatan tokoh masyarakat merupakan faktor pendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur komunikasi, kultur masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta kondisi geografis yang menyulitkan jangkauan dan aksesibilitas merupakan faktor penghambat implementasi BANGGA Papua.

Untuk itu dimensi modern menghendaki keterlibatan atau partisipasi dari para pelaksana dan elemen masyarakat diwadahi dalam suatu sistem yang modern, akan tetapi modernitas melalui pengintegrasian itu tidak mengabaikan kultur dan budaya yang hidup di tengah masyarakat kelompok sasaran. Masyarakat tradisional harus dirawat kearifan lokalnya, namun harus dapat dijumpai dan difasilitasi oleh sistem dan perangkat modern (Taum, 2015; Tebay, 2016). Hal ini karena munculnya harapan bahwa integrasi teknologi dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu, sulitnya aksesibilitas dan jangkauan, serta mampu memberdayakan solidaritas keterlibatan *civil society* yaitu masyarakat adat sebagai kelompok sasaran program, yang ujung tombaknya mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat. Teknologi sebagai bagian dari modernitas harus diberdayakan untuk mengatasi hambatan, sambil memodernisasikan cara pandang masyarakat yang kurang baik sebagai implikasi negatif dari kultur dan paradigma pemikiran yang tradisional namun kurang baik.

3. Inovasi Pelaksana (*Partnership*)

Inovasi secara sederhana dimaknai sebagai pembaharuan. Maka dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini memberikan stimulan pemikiran bahwa ketika pelaksana tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengimplementasikan suatu program, hendaknya dilakukan pembaharuan pada kelembagaan secara struktural, organisasional, maupun fungsional (Unit, 2014). Dimensi ini didasarkan pada elaborasi temuan analisis dimana program BANGGA Papua pada dasarnya diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah namun produktivitasnya rendah. Kemudian, keterlibatan fasilitator di luar pemerintahan, adanya pengawasan berjenjang dan adanya teknologi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dapat mendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, rendahnya kesadaran dan komitmen para pelaksana, ketersediaan SDM pelaksana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang menyulitkan aksesibilitas dan jangkauan merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi BANGGA Papua. Untuk itu, inovasi pada pelaksana dibutuhkan sehingga memunculkan konsep *partnership* dalam implementasi program BANGGA.

Inovasi pelaksana, bukan hanya dititik beratkan pada perilaku atau norma-norma semata yang menuntut komitmen dan kesadaran, lebih dari itu inovasi juga pada pelaksanaan suatu program, dalam arti yang luas inovasi mengakomodir cara,

metode maupun prosedur yang mampu mendayagunakan kemitraan dalam mencapai tujuan Bersama dari diimplementasikannya suatu kebijakan publik.

4. Legalistik

Legalistik berasal dari kata “legal” yang dalam Bahasa Indonesia dapat bermakna hukum, atau sah. Pemaknaan legalistik ini, dalam konteks kebijakan publik, menurut peneliti merupakan konstruksi konsep pemikiran bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan, perlunya justifikasi hukum terhadap suatu keputusan yang melembaga dan mempunyai tujuan bagi kepentingan publik (Yaluwo, 2021). Demikian pula, secara sederhana legalistik dapat dimaknai sah sesuai aturan atau sesuai hukum.

Dimensi legalistik pada dasarnya menawarkan pemahaman bahwa pentingnya suatu *legal standing* atau landasan hukum, wujudnya yakni regulasi dalam berbagai hierarkinya. Meskipun kebijakan berada di tataran wilayah daerah, karena Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan terkoneksi dari tingkatan daerah paling bawah hingga ke pusat, maka *legal standing* atau regulasi haruslah sama-sama kuat, atau regulasi yang atas menguatkan regulasi di tingkat bawahnya. Untuk itu, konsep ini secara praktikal hendak memberikan masukan untuk pusat dan daerah, dimana kiranya untuk daerah seperti Papua, kebijakan semacam program perlindungan sosial yang dijalankan adalah lebih mendayagunakan Pemerintah Kabupaten khususnya, agar realisasi beserta capaian tujuan program lebih terjaga, dengan fondasi *legal standing* atau regulasi yang kuat, jelas dan komprehensif. Sehubungan dengan pemaknaan implementasi sebagaimana Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”.

Dimensi ini juga berangkat dari elaborasi terhadap temuan bahwa program BANGGA Papua yang diimplementasikan selama ini cukup berjalan dengan baik namun minim produktivitas. Adanya regulasi-regulasi yang sejalan dengan kebijakan program BANGGA Papua dan adanya petunjuk teknis operasional merupakan faktor pendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, tidak adanya jaminan keberlangsungan program, tidak ada aturan sanksi bagi penyalahgunaan bantuan BANGGA Papua, serta kultur masyarakat dapat menghambat implementasi BANGGA Papua. Untuk itulah legalistik yang menjadi sandaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, ataupun kebijakan tertulis maupun tidak tertulis, hendaknya dalam tahap-tahap pelaksanaan program kebijakan tidak boleh mengabaikan kultur masyarakat, dan sifat-sifat dari hukum yang seringkali menghendaki adanya sanksi agar suatu ketentuan itu ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, yang lebih penting adalah legalistik mampu menjamin keberlangsungan suatu program, meskipun pada pelaksanaan suatu program dihadapkan pada kendala *force majeure* maupun persoalan di luar administrasi dan teknis.

5. Empirik/Efisiensi

Konsepsi efisiensi atau empirik berangkat dari pemahaman sederhana bahwa pendayagunaan sumber daya yang ada harus menjadi katalisator dalam mensukseskan program kebijakan. Dimensi ini dielaborasi dari temuan penelitian yaitu program BANGGA Papua yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat telah cukup baik akan tetapi rendah produktivitas. Untuk itu, efisiensi dalam dimensi ini menawarkan gagasan bahwa aspek-aspek personil, pembiayaan dan peralatan sebagai bagian dari dimensi efisiensi, idealnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan SDM, anggaran, peralatan dan teknologi dengan memanfaatkan keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintahan, seperti adanya fasilitator dari pihak LSM atau organisasi non pemerintahan, maupun *civil society* melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh pemuda. Konsep efisiensi ini, mengarah pada pendayagunaan aspek personil, pembiayaan dan peralatan untuk diarahkan pada pencapaian hasil maksimal, terutama persoalan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan sebelumnya, maka dari hasil penelitian diambil kesimpulan yaitu Program BANGGA Papua diimplementasikan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Asmat. Hal ini dipandang dari perspektif linearitas dimana program yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur, biaya, dan tempat, walaupun tidak sesuai waktu; dan program yang dilaksanakan cukup efisiensi dimana Pemerintah Kabupaten Asmat cukup baik dalam mendayagunakan pelaksana, aset, dana dan teknologi. Sementara, produktivitas dari jumlah capaian sasaran kebijakan masih rendah. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang paling relevan dan dominan mengemuka pada pelaksanaan. Model implementasi kebijakan BANGGA Papua atau model implementasi kebijakan SMILE yang terdiri dari dimensi sinergitas, modern, novasi, legalistik, dan efisiensi disusun sebagai model yang dipandang ideal diterapkan di Kabupaten Asmat maupun di daerah lain. Model Implementasi Kebijakan SMILE juga dipandang dapat diaplikasikan secara teoretis dan praktis pada kebijakan-kebijakan pemberian bantuan sosial.

Daftar Pustaka

- Astuti, M. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 215-235.
- Bakar, K. A. A., Noor, I. H., & Widodo, W. (2018). Nurturing Nationalism Character Values at the Primary Schools in Jayapura, Papua. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 37(1).
- Brata, W. K. W. (2022). Strategi Komunikasi Politik Pemerintah sebagai Penyelesaian Konflik Papua. *Perspektif*, 1(4), 339-344.

- Fatmawati, F. (2021). Konstruksi Nasionalisme di Tengah Politik Identitas: Studi Kasus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 248-262.
- Gani, N., & Simanjuntak, J. (2019). Analisis Faktor Pengaruh Hubungan Kewenangan Antar Lembaga Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 9(2), 141-170.
- Hubeis, M. (2019). Kajian Potensi Ekonomi Kuliner Lokal di Daerah Bogor, Jakarta Dan Solo. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2).
- Ismail, M. (2015). Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(3), 251-260.
- Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86).
- Larasati, D., Huda, K., Cote, A., Rahayu, S. K., & Siyaranamual, M. (2019). Policy Brief: Inclusive Social Protection for Persons with Disability in Indonesia. *Jakarta: National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K)*.
- Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(20).
- Masro, A., Edison, E., & Gracediani, L. (2013). Implementasi Penanggulangan Gizi Buruk di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(1), 15-20.
- Muliawaty, L. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 82-101.
- Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 1-7.
- Numberi, A., & Setiawan, M. (2013). Pengaruh Kondisi Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Tenaga Kerja Outsourcing (Studi pada PT Bank Papua Kantor Pusat Jayapura). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(1), 145-154.
- Pakasi, U. (2018). Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (RI-PNG) Study Kasus di Wilayah Perbatasan Skow Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 113-121.
- Prionggo, K., Djaenuri, H. A., Lukman, S., & Sinurat, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(2), 91-106.
- Rais, M. (2019). Indeks Karakter Siswa Ddi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Papua Barat. *Educandum*, 5(1), 127-144.

- Rais, M. (2019). Indeks Karakter Siswa di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Papua Barat. *Educandum*, 5(1), 127-144.
- Ridho, A. A., & Prayuginingsih, H. (2018). Analisis Kelayakan Usahatani Kelinci di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*, 2(1).
- Rivai, A. B. (2015). Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Papua. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 266-287.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 311-330.
- Roziqi, M. A. M., & Rosyidin, M. (2020). Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua. *Journal of International Relations*, 6(2), 189-198.
- Sidik, A. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Taum, Y. Y. (2015). Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Penelitian*, 19(1).
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Limen*, 12(2, April), 82-106.
- Unit, E. I. (2014). Creative Productivity Index: Analysing Creativity and Innovation in Asia. *The Economist Intelligence Unit for the Asian Development Bank*. Retrieved November, 15, 2015.
- Yaluwo, P. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 10-19.